

SKRIPSI

PENCEGAHAN PERUSAKAN HUTAN LINDUNG

DI PROVINSI SUMATERA BARAT

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :



Program Kekhususan: Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam (PK VIII)

Pembimbing :

Dr. Syofiarti, S.H., M.Hum

Romi, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

ABSTRAK

Salah satu tujuan Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum demi menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan itu adalah melalui pembangunan nasional yang membutuhkan Sumber Daya Alam. Hutan menempati posisi sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui, artinya ketersediaan akan sumber daya hutan akan selalu terjamin apabila dikelola dengan baik dan benar. Namun selama pandemi laju kerusakan hutan dunia mengalami peningkatan. Hal ini diakibatkan oleh penegakan hukum dan lembaga perlindungan hutan telah dibatasi oleh pemberlakuan *lockdown* akibat pandemi COVID-19 dan pemotongan anggaran karena terjadinya kesengsaraan ekonomi. Selain itu terdapat indikasi bahwa beberapa pemerintah telah bereaksi terhadap krisis ekonomi dengan melonggarkan peraturan lingkungan sebagai cara untuk memfasilitasi investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga terjadi pada hutan lindung di Sumatera Barat. Luas kawasan hutan di Sumatera Barat dengan kawasan terluas adalah hutan lindung selama pandemi COVID-19 juga mengalami penurunan jumlah kawasan hutan yang diakibatkan oleh perusakan hutan. Bahkan perusakan hutan lindung di Sumatera Barat telah memberikan efek yang parah bagi keselamatan ekologi dan juga bagi keselamatan Masyarakat disekitarnya. Atas dasar itu penelitian ini dilakukan dengan permasalahan yang akan diteliti adalah *pertama*, bagaimana bentuk perusakan hutan pada hutan lindung di Sumatera Barat. *Kedua*, bagaimanakah kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pencegahan perusakan hutan pada hutan lindung yang ada di Sumatera Barat. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan bersifat deskriptif. Adapun teknis pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara terhadap pihak terkait serta melalui dokumen-dokumen yang ada melalui data tertulis. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa bentuk perusakan hutan pada hutan lindung di Sumatera Barat adalah berupa 1) Penggunaan hutan lindung tanpa izin(dalam hal ini berupa pertambangan emas *illegal*). 2) Pembalakan liar (*illegal logging*). Untuk mengatasi pencegahan perusakan hutan pada kawasan hutan di Sumatera Barat maka Pemerintah Daerah Sumatera Barat membuat kebijakan berupa: 1) Koordinasi lintas sektor 2) Pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pengamanan hutan 3) Peta penunjukkan kawasan hutan sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan 4) Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan

Kata Kunci: *Perusakan Hutan, Hutan Lindung, Pencegahan dan Pemberantasan.*